



PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 BAPPEDA

Kabupaten Pangandaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan gambaran pelayanan, kinerja, permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Kabupaten Pangandaran dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra

ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Bupati Pangandaran, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021 – 2026 yaitu : “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran. Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Rancangan Renstra ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, oleh sebab itu saran dan perbaikan perlu dilakukan agar perubahan rencana strategis ini dapat mengakomodir tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021 – 2026.

Parigi, September 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PANGANDARAN



H.M. AGUS SATRIADI, S.Pt MP
Pembian Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022	12
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.....	12
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022	13
Tabel 2.5	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022	14
Tabel 2.6	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022	15
Tabel 2.7	Kondisi Pegawai Non PNS/Honorer Bappeda Berdasarkan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	29
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghamban dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	29
Tabel 3.5	Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	31

Tabel 3.6	Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pangandaran Faktor yang ditinjau	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Pangandaran	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Rentang Usia Pegawai	13
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Pegawai	14
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Bidang	15
Gambar 2.5	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan	16
Gambar 2.6	Jumlah Pegawai Non PNS/Honorer Bappeda Berdasarkan Pendidikan	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karena itu, seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintahan kedepan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perubahan perkembangan, maka pemerintah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam

Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Pangandaran. Melalui perencanaan strategik yang baik, Bappeda diharapkan lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Bappeda, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Noor 58, tambahan Lembaran Neraga RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016- 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Bappeda antara lain:

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

b. Tujuan

- a) Menjamin konsistensi perencanaan teknis Bappeda dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran;
- b) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Bappeda maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- c) Menetapkan sasaran Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pangandaran serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

Perangkat Daerah, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi

salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

pada bagian ini dikemukakan rumusan terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menjelaskan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Kelompok Substansi Keuangan.
- c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan membawahi:
 1. Kelompok Substansi Perekonomian;
 2. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 3. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi :
 1. Kelompok Substansi Infrastruktur;
 2. Kelompok Substansi Kewilayahan.
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Kelompok Substansi Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

- f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
membawahkan :
1. Kelompok Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;

Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut di atas, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan penelitian pengembangan, infrastruktur dan kewilayahan, dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerahp

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

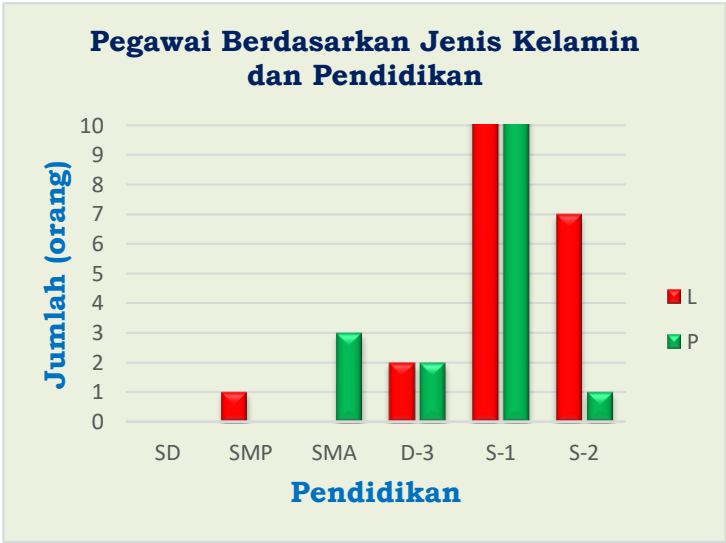
2.2.1 Keadaan Pegawai

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Kondisi Pegawai ASN Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SMP	1	1	2
3	SMA	0	3	3
4	D-3	2	4	6
5	S-1	29	11	40
6	S-2	7	8	15
7	S-3	0	0	0
Jumlah		39	27	66

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022



Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

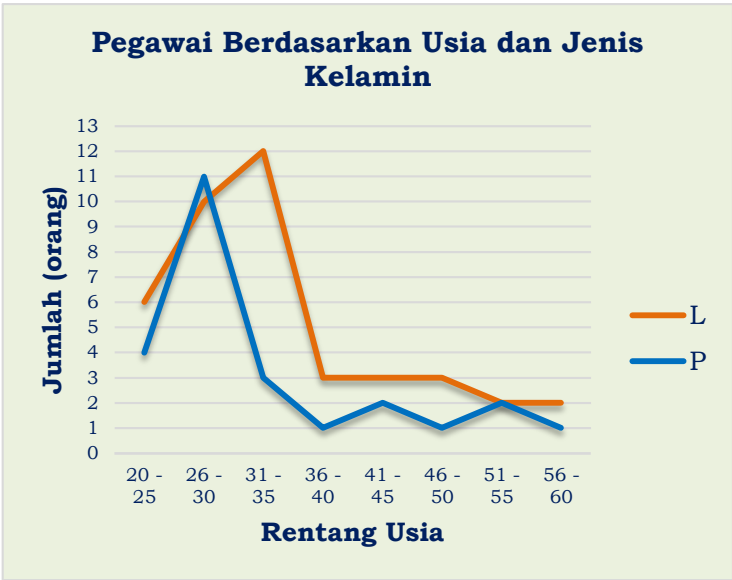
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan usia sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	20 - 25	6	4	10
2	26 - 30	10	11	21
3	31 - 35	12	3	15
4	36 - 40	3	1	4
5	41 - 45	3	2	5
6	46 - 50	3	1	4
7	51 - 55	2	2	4
8	56 - 60	2	1	3
Jumlah		41	25	66

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Rentang Usia Pegawai

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran

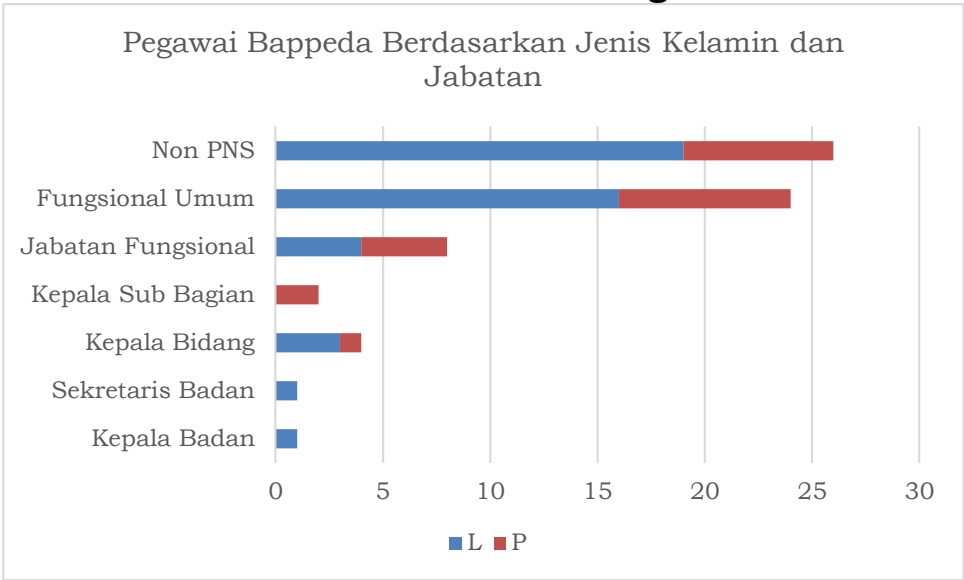
Pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan jabatan struktural sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris Badan	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5	Jabatan Fungsional	4	4	8
6	Fungsional Umum	16	8	24
7	Non PNS	19	7	26
Jumlah		44	22	66

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Pegawai



Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Pegawai

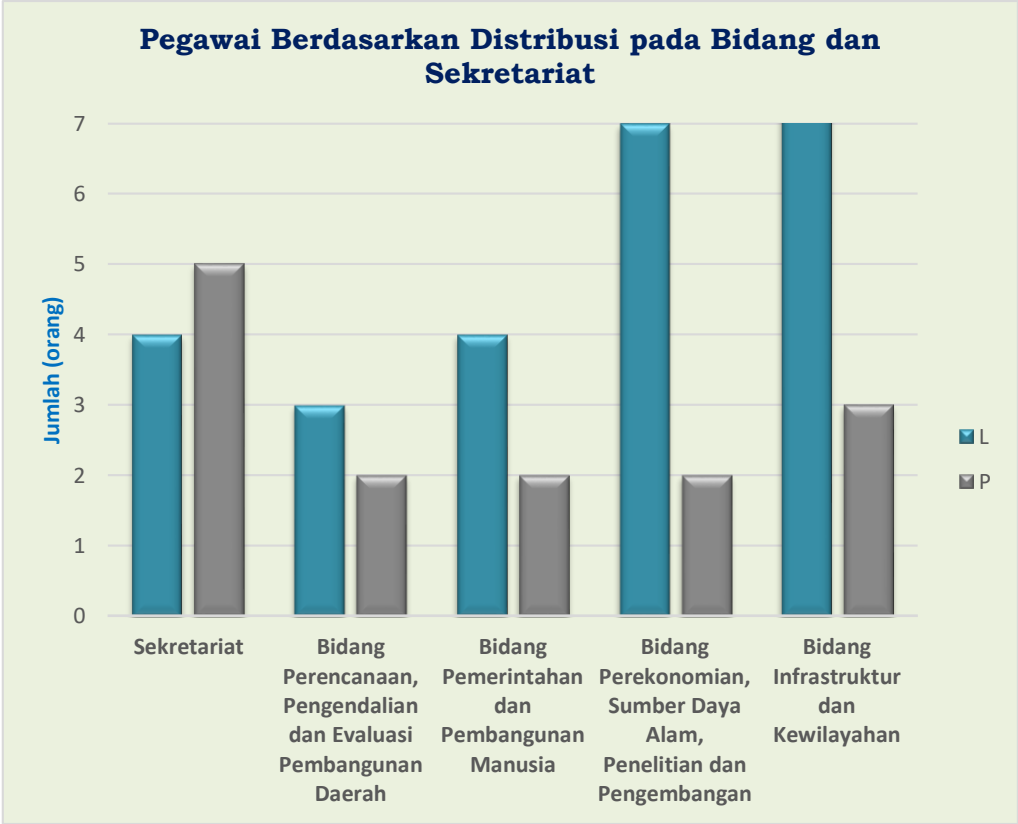
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan sebaran perbidang sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.5 Kondisi Pegawai ASN Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretariat	15	9	24
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	3	7
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	3	9
4	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan Pengembangan	8	4	12
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9	5	14
Jumlah		42	24	66

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022



Gambar 2.4 Grafik Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Perbidang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

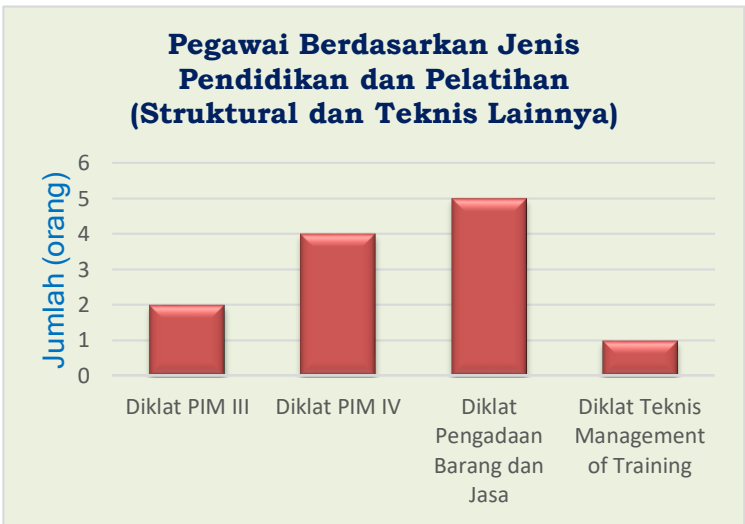
Pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Jenis

Pendidikan dan Pelatihan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya} sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Orang)
Diklat PIM III	2
Diklat PIM IV	4
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	5
Diklat Teknis Management of Training	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022



Gambar 2.5 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan

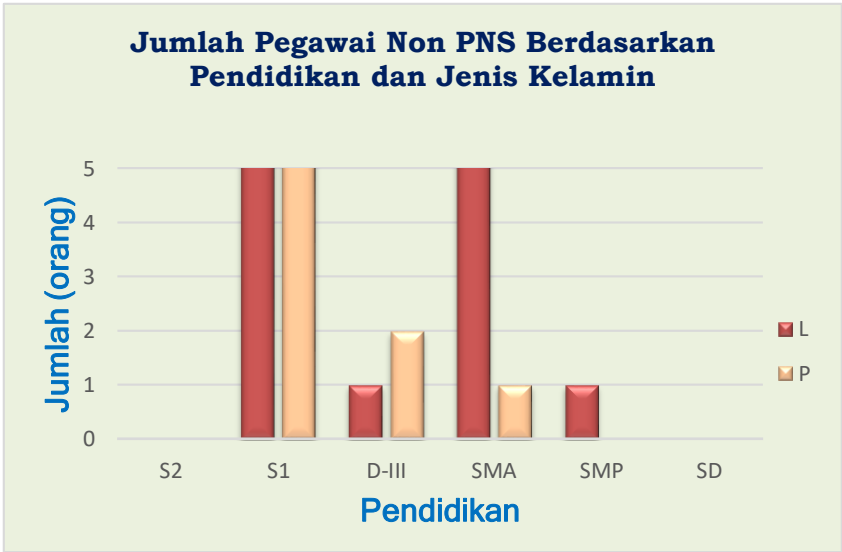
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Kondisi Pegawai Non PNS/Honorar Bappeda Berdasarkan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	0	0	0
2	S2	0	0	0
3	S1	8	7	15
4	D-III	1	2	3
5	SMA	6	1	7
6	SMP	1	0	1
7	SD	0	0	0
Jumlah		16	10	26

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022



Gambar 2.6 Jumlah Pegawai Non PNS/Honorar Bappeda Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

2.2.2 Keadaan sarana dan prasarana Perangkat Daerah

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran berdiri diatas lahan seluas 832 M², berada di Dusun Karangkamulyan RT 002 RW 002 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan asal usul

tanah dan bangunan hasil Pembelian/APBD 2020. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pangandaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
1	Kendaraan Roda 4	6	Baik
2	Kendaraan Roda 2	6	Baik
3	Portable Water Pump	1	Rusak
4	Filing Besi/ Metal	8	Baik
5	Lemari Arsip	7	3 Rusak, 4 Baik
6	Rak Arsip / Kayu	1	Rusak
7	Rak Arsip / Besi	2	Baik
8	Rak Arsip Gantung / Kayu	4	2 Rusak, 2 Baik
9	Mesin Ketik Manual	1	Rusak
10	Mesin Ketik Elektrik	1	Baik
11	Mesin Pompa Air	2	1 Baik, 1 Rusak
12	Kursi Rapat	24	14 Baik, 10 Rusak
13	Kursi Tamu	2	Baik
14	Kursi Putar	16	10 Baik, 6 Rusak
15	Kursi Kerja	39	20 Baik, 19 Rusak
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	5 Rusak, 6 Baik
17	Meja Biro	2	Baik
18	Meja Kerja	24	9 Baik, 15 Rusak
19	Meja Rapat	4	Baik
20	Lemari Es	1	Baik
21	AC Unit	18	14 Baik, 4 Rusak
22	Kipas Angin	2	Rusak
23	Kompore Gas	1	Baik
24	Tabung Gas	1	Baik
25	Dispenser	2	Baik
26	Televisi	2	Baik
27	Wireless	2	Rusak

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
28	<i>Personal Facsimili</i>	1	Baik
29	<i>Wireless Access Point</i>	1	Baik
30	Camera Video	3	1 Baik, 2 Rusak Berat
31	<i>Handy cam</i>	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
32	Komputer PC	7	4 Baik, 3 Rusak
33	Laptop	35	25 Baik, 10 Rusak
34	Notebook	1	Baik
35	Printer	26	11 Baik, 15 Rusak Berat
36	UPS Stabilizer	2	Baik
37	Hardisk Eksternal	8	Baik
38	Server	1	Baik
39	Proyektor & Attachment	4	Baik
40	Layar Proyektor	1	Baik
41	Wireless Microphone	1	Baik
42	Brankas	1	Baik
43	Batterai Kamera	1	Rusak Berat
44	Tablet Machine	2	1 Baik, 1 Rusak
45	Router	1	Baik
46	Compact Disk	1	Baik
47	Electric Generating Set	1	Baik
48	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	4	Rusak Berat
49	Papan Instansi	1	Baik
50	White Board	1	Baik
51	GPS Map	1	Baik
52	Sound Sistem	2	Baik
53	Epson Work Colour Dokumen	1	Baik
54	Infocus Projektor	6	2 Baik 4 Rusak
55	Tang Crimping	1	Baik
56	Kabel LAN/UTP	1	Baik

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
57	RG45 CAT 6	1	Baik
58	Microtik	1	Baik
59	Kabel HDMI	1	Baik
60	Sepliter HDMI	1	Baik
61	Stand Mic	1	Baik
62	Penghancur Kertas	6	6 Rusak

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan.				NA	NA	15%	21%	25%	28%	NA	NA	22,22%	22,09%	22,24%	%	NA	NA	7,22%	1,09%	-2,76%	%
2.	Persentase sinergitas dan konsistensi Perencanaan pembangunan.				NA	NA	80%	85%	90%	95%	NA	NA	94,26%	98,17%	97,75%	%	NA	NA	14,26%	13,17%	7,75%	%
3.	Nilai SAKIP Bappeda.				NA	NA	B/65%	B/70%	A/85%	AA/ 90%	NA	NA	A/ 89,71%	A/ 89,86%	A/ 89,88%	%	NA	NA	24,71%	19,96%	0,02%	%
4.	Persentase data dalam pangandaran satu data.				NA	NA	80%	85%	90%	95%	NA	NA	88,89%	85,71%	100%	%	NA	NA	8,89%	0,71%	10%	%

TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Sekretariat	NA	1,616,482,500	1,249,449,125	987.210.000	3.589.465.736	-	NA	1,513,558,304	1,184,578,891	962.056.717	3.504.204.708	-	NA	93.63%	94.81%	97,45%	97,62%	-	1.860.651.840	95,88%
2.	Prasarana Wilayah	NA	787,875,000	1,141,937,000	695.950.000	3.685.516.546	-	NA	748,184,044	1,047,990,299	686.950.131	3.466.708.390	-	NA	94.96%	91.77%	98,71%	94,06%	-	1.577.819.637	94,88
3.	Ekolittbang	NA	948,150,500	971,092,000	482.230.000	2.356.315.652	-	NA	946,869,000	963,239,800	472.624.000	2.200.213.909	-	NA	99.86%	99.19%	98,01%	93,38%	-	1.189.447.038	97,61%
4.	Pemkesra	NA	1,278,729,000	765,214,000	409.800.000	1.047.314.727	-	NA	1,227,544,270	580,245,015	407.478.610	976.276.595	-	NA	96.00%	75.83%	99,43%	93,22%	-	875.264432	91,12%
5.	Perencanaan dan Pembangunan	NA	1,638,870,000	1,578,010,000	1.945.200.000	1.189.873.796	-	NA	1,549,859,256	1,535,687,773	1.765.595.227	1.091.260.326	-	NA	94.57%	97.32%	90,77%	91,71%	-	1.587.988.499	93,60%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

- 1) Kurang optimalnya tingkat konsistensi antara proses perencanaan dan proses penganggaran serta konsistensi proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- 2) Data, informasi dan hasil kajian yang tersedia belum sepenuhnya digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
- 3) Belum optimalnya usulan yang terakomodir pada RKPD karena banyaknya usulan yang belum sesuai dengan prioritas daerah dan ranwal RKPD;
- 4) Kurang optimalnya monitoring/pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
- 5) Belum optimalnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah karena keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :

- 1) Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
- 2) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan daerah dan dukungan database perencanaan;

- 3) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
- 4) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan KRISNA.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan penelitian pengembangan, infrastruktur dan kewilayahan, dan kelompok jabatan fungsional;
4. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
5. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Pangandaran masih menghadapi permasalahan, masalah tersebut disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu.

1. Adanya konflik kepentingan dan keterbatasan waktu (deadline) perencanaan di daerah.

2. Perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencanaan.
3. Kendala teknis pelaksanaan di lapangan.
4. Kurangnya komitmen SDM pelaksana.
5. Kurangnya hasil jumlah penelitian yang dihasilkan oleh Pemkab Pangandaran.

Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Pangandaran
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
Urusan Perencanaan			
1.	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar Pusat dan Daerah.	Adanya konflik kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di daerah.
		Belum optimalnya koordinasi antar institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antar perencanaan dan penganggaran.	Perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencanaan.
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.	- Kendala teknis pelaksanaan di lapangan. - Kurangnya komitmen SDM pelaksana.
Urusan Penelitian dan Pengembangan			
1.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan	Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di	Kurangnya jumlah hasil penelitian yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

	kebijakan perencanaan pembangunan.	Kabupaten Pangandaran.	
--	------------------------------------	------------------------	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah: **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Pangandaran terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi/Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan dengan target sasaran yang direncanakan.	Belum optimalnya koordinasi antar institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	a. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. b. Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi. c. Dukungan Teknologi Informasi SIPD.
			Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.	a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka

No	Misi/Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				menjamin sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional daerah. b. Pemantauan perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan pembangunan yang didukung dengan aplikasi e-monela. c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi bulanan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan. d. Kerjasama Pemda Pangandaran dengan Universitas Brawijaya Malang dan Perguruan Tinggi lainnya untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping daerah dan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu.

1. Menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasar sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 – 2024, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Pangandaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.	Perbedaan periode waktu perencanaan berpegaruh terhadap perencanaan di daerah.	Surat Edaran Mendagri No. 640/16/SJ tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan KDH serentak tahun 2020.

(Sumber : Renstra Bappenas 2019-2024, diolah)

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Jabar	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.	Belum optimalnya system pendampingan perencanaan perumpunan OPD.	Koordinasi antar stakeholders perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pangandaran yang belum optimal.	Mulai terbangunnya system informasi yang mendukung peningkatan kinerja perencanaan Bappeda Kabupaten Pangandaran.
2.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan tepat waktu.	Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.	Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.	Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.
3.	Meningkatnya proporsi SDM Perencana terhadap kebutuhan ideal.	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana.	Peningkatan kapasitas aparatur masih belum maksimal.	Tersedianya pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan formal.

(Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 2018-2023, diolah)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis pertanian dan industri, RTRW berfungsi sebagai:

- Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
- Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;

- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan struktur ruang terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan kawasan pariwisata yang berperan sebagai generator ekonomi dalam lingkup lokal dan regional.
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kabupaten yang terpadu dengan sistem regional dan nasional.

Tabel 3.5
Telahaan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan
Bappeda Kabupaten Pangandaran

No	Telahaan	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang RTRW
2.	Pengendalian Penataan Ruang	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	
3.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat sparsial	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW, diolah)

3.4.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pangandaran yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **democratic governance** sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Bappeda Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya. Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-

2026. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Bappeda Kabupaten Pangandaran dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Bappeda Kabupaten Pangandaran yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026; (ii) Sesuai tugas dan fungsi Bappeda; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Bappeda
- b. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan Bappeda
- c. Bappeda produktif menghasilkan dokumen-dokumen kajian

2. Kelemahan Internal

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang perencanaan dan analisis kebijakan.
- b. Belum dimanfaatkannya dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
- c. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah.

- b. Masih adanya ketidaktaatan Perangkat Daerah dalam mempedomani dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
 - c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif , adaptif dan cepat.
4. Peluang dari lingkungan eksternal
- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
 - b. Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik.
 - c. Adanya tenaga ahli pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 3.6
Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten
Pangandaran Faktor yang ditinjau

Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pangandaran Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu –isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbaru; 2. Pengembangan sistem inovasi daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik; 3. Pengembangan kebijakan teknis perencanaan daerah yang sinergis guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, pencapaian	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: 1. Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, didukung akurasi dan data terbaru. 2. Implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pangandaran Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu –isu
	kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
Sasaran jangka menengah Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi Bappeda yaitu: a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, b. Peningkatan kapasitas SDM Perencana.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: a. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah, b. Peningkatan kualitas SDM.
Jawa Barat	Kelembagaan Bappeda	
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan pengembangan pengembangan kewilayahan.
Implikasi KLHS	Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi risiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda dalam pengendalian perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi dan misi kepala daerah, telaahan rencana strategis kementerian, telaahan rencana strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur bidang perencanaan dan kelitbangan;
3. Kualitas data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
4. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas dan tindak lanjut dokumen hasil kajian dan inovasi dijadikan sebagai kebijakan daerah.
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 ayat (2), menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Mengacu pada visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan, maka tujuan BAPPEDA Kabupaten Pangandaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan sasaran : *“Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”*. Tujuan dan sasaran tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD 2021-2026 yaitu : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN							
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	T. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		IT.1 Nilai SAKIP	66,73	66,90-67,15	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76-00	76,25-81-00	81,25-85,00	81,25-85,00
		S.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	IS.1 Nilai LHE AKIP BAPPEDA	89,90 Nilai	89,90 Nilai	89,95 Nilai	90,00 Nilai	90,05 Nilai	90,10 Nilai	90,15 Nilai	90,15 Nilai
			IT.2 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan di atas 22,24%	22,40 %	22,40 %	22,55 %	22,70 %	22,85 %	23,00 %	23,15 %	23,15 %
		S.2 Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	IS.2 Persentase OPD Dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan di atas 13	65,71 % (23 OPD)	65,71 % (23 OPD)	68,57 % (24 OPD)	71,43 % (25 OPD)	74,29 % (26 OPD)	77,14 % (27 OPD)	80,00 % (28 OPD)	80,00 % (28 OPD)
		S.3 Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	IS 3.1 Persentase Terpenuhi nya Dokumen Perencanaan Daerah Yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			IS 3.2 Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	76,70	76,70	76,85	77,00	77,25	77,50	77,75	77,75
		S.4 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	IS.5 Persentase implementasi rencana kelitbangan	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	85-100%	85-100%

Catatan :
Rumusan Perhitungan 5 (lima) Indikator sasaran Tersebut diatas adalah:

Indikator Sasaran 1 = Nilai LHE AKIP Bappeda

Indikator Sasaran 2 = $\frac{\text{Jumlah PD dengan Nailai LHE AKIP Komponen Perencanaan}>10,95}{\text{Jumlah PD Se Kabupaten Pangandaran}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 3.1 = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun}}{\text{Jumlah dok Perencanaan tahunan yang wajib tersusun sesuai dengan tahapan}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 3.2 = $\frac{\sum \text{Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Seluruh IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 4 = $\frac{\sum \text{Kelitbangan dengan RKPd}}{\sum \text{Ketitbangan dengan RPJMD/Renstra}} \times 100\%$

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

Misi :

- 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
- 2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
- 3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
- 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
- 5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
- 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda.
	S.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan komponen perencanaan.	Menyusun SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peningkatan kualitas SAKIP komponen perencanaan.
	S.3 Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen	Mengakomodir program-program antar dokumen perencanaan.	Menjaga sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

	perencanaan pembangunan.		
	S.4 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											20.882.390.224		17.945.584.830		18.901.859.209		20.390.208.109		19.538.858.437		20.479.738.864		20.479.738.864		
T. Mewujudkan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Yang Berkualitas	IT.1 Nilai SAKIP							66,73	66,73		60-70		60-70		70-80		70-80		80-90		80-90				
S.1 Mengingkatnya Akuntabilitas kinerja bappeda	IS.1 Nilai LHE AKIP BAPPEDA							89,90 Nilai	89,90 Nilai		89,95 Nilai		90,00 Nilai		90,05 Nilai		90,10 Nilai		90,15 Nilai		90,15 Nilai				
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparaturn 4. Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90	6.833.980.181	91	9.037.187.347	92	9.729.900.325	93	10.308.333.953	94	10.248.184.630	95	10.696.499.287	95	10.696.499.287		
		5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	105.601.000	5 Dokumen	126.721.200	5 Dokumen	127.000.000	5 Dokumen	138.250.000	5 Dokumen	142.000.000	5 Dokumen	147.400.000	5 Dokumen	147.400.000		
		5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	81.441.000	4 Dokumen	97.729.200	4 Dokumen	98.000.000	4 Dokumen	107.800.000	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	112.200.000	4 Dokumen	112.200.000		
		5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	24.160.000	1 Dokumen	28.992.000	1 Dokumen	29.000.000	1 Dokumen	30.450.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	35.200.000	1 Dokumen	35.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan aan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Evaluasi		n Evaluasi		Evaluasi		Evaluasi		Evaluasi		Evaluasi		Evaluasi			
		5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.198.325.649	100	5.037.990.779	100	5.182.055.782	100	5.476.274.472	100	5.585.799.961	100	5.697.515.961	100	5.697.515.961		
		5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	4.001.805.649	1 Tahun	4.802.166.779	1 Tahun	4.946.231.782	1 Tahun	5.193.543.372	1 Tahun	5.297.414.239	1 Tahun	5.403.362.524	1 Tahun	5.403.362.524		
		5	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Bulan	24 Bulan	112.485.000	24 Bulan	134.982.000	24 Bulan	134.982.000	24 Bulan	141.731.100	24 Bulan	144.565.722	24 Bulan	147.457.036	24 Bulan	147.457.036		
		5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.710.000	1 Dokumen	96.852.000	1 Dokumen	96.852.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	102.000.000	1 Dokumen	104.040.000	1 Dokumen	104.040.000		
		5	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3.325.000	3 Dokumen	3.990.000	3 Dokumen	3.990.000	3 Dokumen	41.000.000	3 Dokumen	41.820.000	3 Dokumen	42.656.400	3 Dokumen	42.656.400		
		5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	32.250.000	100	38.700.000	100	38.700.000	100	42.570.000	100	43.421.400	100	47.763.540	100	47.763.540		
		5	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	1 Tahun	1 Tahun	32.250.000	1 Tahun	38.700.000	1 Tahun	38.700.000	1 Tahun	42.570.000	1 Tahun	43.421.400	1 Tahun	47.763.540	1 Tahun	47.763.540		
		5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	31.786.500	100	38.143.800	100	38.143.800	100	41.958.180	100	45.000.000	100	49.500.000	100	49.500.000		
		5	01	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	31.786.500	1 Tahun	38.143.800	1 Tahun	38.143.800	1 Tahun	41.958.180	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	49.500.000	1 Tahun	49.500.000		
		5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	%	100	968.243.948	100	1.452.726.807	100	2.031.513.086	100	2.330.549.385	100	2.143.236.382	100	2.447.920.020	100	2.447.920.020		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan aan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Perangkat Daerah																	
		5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	18.444.650	2 Jenis	22.133.580	2 Jenis	23.240.259	2 Jenis	25.564.285	2 Jenis	26.075.571	2 Jenis	28.683.128	2 Jenis	28.683.128		
		5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	85 Jenis 4 Jenis	85 Jenis 4 Jenis	264.783.711	85 Jenis 4 Jenis	541.740.453	85 Jenis 4 Jenis	1.167.000.000	85 Jenis 4 Jenis	1.537.700.000	85 Jenis 4 Jenis	1.247.000.000	85 Jenis 4 Jenis	1.490.940.000	85 Jenis 4 Jenis	1.490.940.000		
		5	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	255.436.137	10 Jenis	434.677.434	10 Jenis	380.000.000	10 Jenis	280.000.000	10 Jenis	333.000.000	10 Jenis	339.660.000	10 Jenis	339.660.000		
		5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	23.161.450	1 Tahun	27.793.740	1 Tahun	29.183.427	1 Tahun	32.101.770	1 Tahun	32.743.805	1 Tahun	36.018.186	1 Tahun	36.018.186		
		5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	32.628.000	25 Jenis	39.153.600	25 Jenis	40.500.000	25 Jenis	44.550.000	25 Jenis	46.000.000	25 Jenis	50.600.000	25 Jenis	50.600.000		
		5	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1 Gedung	1 Gedung	52.405.000	1 Gedung	62.886.000	1 Gedung	66.030.300	1 Gedung	72.633.330	1 Gedung	80.417.006	1 Gedung	88.458.707	1 Gedung	88.458.707		
		5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	301.100.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	385.000.000	12 Bulan	385.000.000		
		5	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.285.000	1 Dokumen	24.342.000	1 Dokumen	25.559.100	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.560.000	1 Dokumen	28.560.000		
		5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	693.664.334	100	724.261.161	100	601.979.697	100	499.748.558	100	509.743.529	100	519.938.400	100	519.938.400		
		5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis	55.946.700	6 Jenis	120.000.000	6 Jenis	120.000.000	6 Jenis	126.000.000	6 Jenis	128.520.000	6 Jenis	131.090.400	6 Jenis	131.090.400		
		5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	15 Jenis	15 Jenis	432.717.634	15 Jenis	519.261.161	15 Jenis	396.979.697	15 Jenis	284.498.558	15 Jenis	290.188.529	15 Jenis	295.992.300	15 Jenis	295.992.300		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Mesin Lainnya yang diadakan																		
		5	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Gedung 1000 M2	1 Gedung 1000 M2	205.000.000	1 Gedung 1000 M2	85.000.000	1 Gedung 1000 M2	85.000.000	1 Gedung 1000 M2	89.250.000	1 Gedung 1000 M2	91.035.000	1 Gedung 1000 M2	92.855.700	1 Gedung 1000 M2	92.855.700			
		5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	735.958.750	100	1.208.643.600	100	1.259.507.960	100	1.322.483.358	100	1.322.483.358	100	1.284.311.367	100	1.284.311.367			
		5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	7.203.000	2 Jenis	8.643.600	2 Jenis	9.507.960	2 Jenis	9.983.358	2 Jenis	9.983.358	2 Jenis	10.981.694	2 Jenis	10.981.694			
		5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 Bulan	12 Bulan	357.600.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	620.000.000	12 Bulan	651.000.000	12 Bulan	651.000.000	12 Bulan	664.020.000	12 Bulan	664.020.000			
		5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Orang, Bulan dan Layanan	11 Orang, Bulan dan Layanan	371.155.750	11 Orang, Bulan dan Layanan	600.000.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	630.000.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	661.500.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	661.500.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	609.309.673	11 Orang, Bulan dan Layanan	609.309.673			
		5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	68.150.000	100	410.000.000	100	451.000.000	100	456.500.000	100	456.500.000	100	502.150.000	100	502.150.000			
		5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Unit	12 Unit	28.400.000	12 Unit	300.000.000	12 Unit	330.000.000	12 Unit	346.500.000	12 Unit	346.500.000	12 Unit	381.150.000	12 Unit	381.150.000			
		5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	1 Gedung	1 Gedung	39.750.000	1 Gedung	110.000.000	1 Gedung	121.000.000	1 Gedung	110.000.000	1 Gedung	110.000.000	1 Gedung	121.000.000	1 Gedung	121.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
T. Mewujudkan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Yang Berkualitas	IT.2 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan di atas 22,24%									22,4%	22,4%		22,55%		22,7%		22,85 %		23%		23,15%		23,15 %			
S.2 Meningkatkan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	IS.2 Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Daerah Yang Berkualitas									95%	95%		96%		97%		98%		99%		100%		100%			
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan kualitas dan cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	83	3.694.327.844	85,71	2.928.987.330	88,57	3.061.055.180	91,42	3.301.850.728	94,28	3.567.256.452	97,14	3.849.356.394	97,14	3.849.356.394			
		5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD dan Aplikasi yang dikelola	12 dokumen dan 1 aplikasi	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.331.630.768	12 dokumen dan 1 aplikasi	1.856.607.330	12 dokumen dan 1 aplikasi	1.943.365.180	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.128.275.728	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.335.502.452	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.560.014.394	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.560.014.394			
		5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Forum PD)	1 Dokumen	1 Dokumen	74.308.418	1 Dokumen	16.651.180	1 Dokumen	19.145.180	1 Dokumen	20.785.728	1 Dokumen	23.472.452	1 Dokumen	26.294.394	1 Dokumen	26.294.394			
		5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Musrenbang Kabupaten)	1 Dokumen	1 Dokumen	504.568.600	1 Dokumen	183.556.150	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	198.000.000	1 Dokumen	203.000.000	1 Dokumen	203.000.000			
		5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD - Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Renja PD - Jumlah Sistem Informasi Pembangunan	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	1.752.753.750	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	1.656.400.000	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	1.739.220.000	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	1.917.490.000	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	2.114.030.000	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	2.330.720.000	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	2.330.720.000			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Daerah yang dikelola																		
		5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah	70%	75%	1.262.697.076	77%	873.990.000	80%	917.690.000	82%	963.575.000	85%	1.011.754.000	87%	1.062.342.000	87%	1.062.342.000			
		5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data perencanaan pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	111.393.348	1 Dokumen	873.990.000	1 Dokumen	917.690.000	1 Dokumen	963.575.000	1 Dokumen	1.011.754.000	1 Dokumen	1.062.342.000	1 Dokumen	1.062.342.000			
		5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1.151.303.728	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-			
		5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan capaian IKU minimum 80%	70%	75%	100.000.000	77%	198.390.000	80%	200.000.000	82%	210.000.000	85%	220.000.000	87%	227.000.000	87%	227.000.000			
		5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan evaluasi RKPD triwulanan - Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	100.000.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	198.390.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	200.000.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	210.000.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	220.000.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	227.000.000	4 Dokumen	227.000.000			
S.3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan unsur perencanaan	IS.3 Persentase OPD Dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan di atas 13%							"65,71% (23 OPD)"	%	"65,71% (23 OPD)"		"68,57% (24 OPD)"		"71,43% (25 OPD)"		"74,29% (26 OPD)"		"77,14% (27 OPD)"		"80,00% (28 OPD)"		"80,00% (28 OPD)"				
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	- Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan		81	5.105.141.799	81	5.349.410.153	81	5.246.484.779	81	5.900.272.393	81	4.777.322.958	81	4.931.877.815	93	4.931.877.815			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							PEMBANGUNAN DAERAH	program RPJMD dan RKPD																	
								- Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran		82		84		87		89		91		93		93			
		5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disintegrasikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	4 Dokumen dan 3 Laporan	4 Dokumen dan 3 Laporan	1.893.000.000	2 Dokumen dan 3 Laporan	1.115.446.211	2 Dokumen dan 3 Laporan	1.831.004.242	4 Dokumen dan 3 Laporan	2.518.280.000	2 Dokumen dan 3 Laporan	1.256.991.855	2 Dokumen dan 3 Laporan	1.308.115.744	2 Dokumen dan 3 Laporan	1.308.115.744		
		5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen RPJMD 1 Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen RPJMD 1 Laporan Hasil Koordinasi	967.000.000	1 Laporan Hasil Koordinasi	330.000.000	1 Laporan Hasil Koordinasi	1.029.980.000	1 Dokumen RPJMD 1 Laporan Hasil Koordinasi	1.029.980.000	1 Laporan Hasil Koordinasi	455.967.613	1 Laporan Hasil Koordinasi	507.091.502	1 Laporan Hasil Koordinasi	507.091.502		
		5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen Hasil Asistensi	1 Dokumen Hasil Asistensi	300.000.000	1 Dokumen Hasil Asistensi	330.000.000	1 Dokumen Hasil Asistensi	345.578.031	1 Dokumen Hasil Asistensi	791.340.000	1 Dokumen Hasil Asistensi	345.578.031	1 Dokumen Hasil Asistensi	345.578.031	1 Dokumen Hasil Asistensi	345.578.031		
		5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen Monev 1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen Monev 1 Dokumen LAKIP	340.282.000	1 Dokumen Monev	145.000.000	1 Dokumen Monev	145.000.000	1 Dokumen Monev	188.760.000	1 Dokumen Monev	145.000.000	1 Dokumen Monev	145.000.000	1 Dokumen Monev	145.000.000		
		5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Laporan	1 Laporan	235.718.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	435.600.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan aan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Lok asi	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
							Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
		5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Lapora n	50.000.000	1 Laporan	60.446.211	1 Lapora n	60.446.211	1 Lapora n	72.600.000	1 Lapora n	60.446.211	1 Lapora n	60.446.211	1 Lapora n	60.446.211			
		5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disnergikan dan diharmonisasik an dengan perencanaan tingkat daerah	5 Dokumen	5 Doku men	346.160.000	6 Dokume n	635.963.942	6 Doku men	644.483.698	6 Doku men	675.979.885	6 Dokum en	713.376.438	6 Dokum en	741.336.520	6 Doku men	741.336.520			
		5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dikoordinasika n	1 Dokumen	2 Dokum en	186.160.000	1 Dokume n	205.963.942	1 Doku men	214.483.698	1 Dokum en	220.979.885	1 Dokum en	233.376.438	1 Dokum en	236.336.520	1 Doku men	236.336.520			
		5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensikan	0 Dokumen	0 Dokum en	-	1 Dokume n	90.000.000	1 Doku men	90.000.000	1 Dokum en	95.000.000	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	105.000.000	1 Doku men	105.000.000			
						03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokum en	50.000.000	1 Dokume n	90.000.000	1 Doku men	90.000.000	1 Dokum en	95.000.000	1 Dokum en	100.000.000	1 Dokum en	105.000.000	1 Doku men	105.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dikoordinasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000		
						06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan SDA	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000		
		5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000		
		5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	15 Dokumen dan 10 Peta	15 Dokumen dan 10 Peta	2.865.981.799	13 Dokumen dan 10 Peta	3.598.000.000	13 Dokumen dan 10 Peta	2.770.996.839	13 Dokumen dan 10 Peta	2.706.012.508	13 Dokumen dan 10 Peta	2.806.954.665	13 Dokumen dan 10 Peta	2.882.425.551	13 Dokumen dan 10 Peta	2.882.425.551		
		5	01	02	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	120.000.000		
		5	01	02	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang Diasistensikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5	01	02	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000		
		5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	857.362.837	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	349.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	364.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	379.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	399.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	419.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	419.400.000		
		5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah yang di koordinasikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	120.000.000		
		5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayah yang Diasistensikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000		
		5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.750.000	1 Dokumen	120.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan aan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Lok asi					
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Peta Tematik Kewilaya han	1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 10 Peta Tematik Kewila yahan	1.408.618.962	1 Dokume n 1 Dokume n 10 Peta Tematik Kewilay ahan 10 Peta Desa Prasisi 93 Peta Batas Desa 1 Peta Adminis trasi Kabupat en 1 Sistem (SIG)	2.648.600.000	1 Doku men 1 Doku men 10 Peta Tematik Kewila yahan 23 Peta Desa Prasisi	1.776.596.839	1 Dokum en 1 Dokum en 10 Peta Temati k Kewila yahan 20 Peta Desa Prasisi	1.666.612.508	1 Dokum en 1 Dokum en 10 Peta Temati k Kewila yahan 20 Peta Desa Prasisi	1.717.554.665	1 Dokum en 1 Dokum en 10 Peta Temati k Kewila yahan 20 Peta Desa Prasisi	1.742.275.551	1 Doku men 1 Doku men 10 Peta Temati k Kewila yahan 20 Peta Prasisi	1.742.275.551		
		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.248.940.400		630.000.000		864.418.925		879.751.035		946.094.397		1.002.005.368		1.002.005.368			
S.4 Tersedianya data dan Informasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	IS.4 Meningkat nya pemanfaat an hasil penelitian dan pengemba ngan dalam pembangu nan daerah								65-85%	65-85%		65-85%		65-85%		65-85%		65-85%		85-100%		85-100%				
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penelitian Sesuai Dengan Rencana	%	N/A	5.248.940.400	40	630.000.000	45	864.418.925	50	879.751.035	55	946.094.397	60	1.002.005.368	60	1.002.005.368			
		5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen pernelitian dan pengembanga n bidang penyelenggara an pemerintahan dan pengkajian peraturan	2 Dokumen dan 3 Laporan	2 Doku men dan 3 Lapora n	494.039.400	2 Laporan	100.000.000	2 Lapora n	109.418.925	2 Lapora n	179.751.035	2 Lapora n	181.094.397	2 Lapora n	181.094.397	2 Lapora n	181.094.397			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	317.904.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		5	05	02	2.02	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	3 Laporan	3 Laporan	176.135.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	109.418.925	2 Laporan	179.751.035	2 Laporan	181.094.397	2 Laporan	181.094.397	2 Laporan	181.094.397	2 Laporan	181.094.397		
		5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	279.901.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000		
		5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	0	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000		
		5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	279.901.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	3 Dokumen	4.475.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	340.000.000	1 Dokumen	370.910.971	1 Dokumen	370.910.971	1 Dokumen	370.910.971		
		5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.438.619.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		5	05	02	2.04	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.630.917.400	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	340.000.000	1 Dokumen	370.910.971	1 Dokumen	370.910.971	1 Dokumen	370.910.971		
		5	05	02	2.05	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.405.463.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0	0	-	2 Dokumen	200.000.000	2	400.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		
		5	5	2	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	0	-	2 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	0	-	0	-	0	-				
		5	5	2	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	0	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		

(Sumber : Kasubag Program Bappeda, diolah)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini, akan dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dijabarkan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal peiode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
		Awal	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IT.1 Nilai SAKIP	66,73	66,73	60-70	60-70	70-80	70-80	80-90	80-90
1.1	IS.1 Nilai LHE AKIP BAPPEDA	89,90 Nilai	89,90 Nilai	89,95 Nilai	90,00 Nilai	90,05 Nilai	90,10 Nilai	90,15 Nilai	90,15 Nilai
2	IT.2 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan di atas 22,24%	22,4%	22,4%	22,55%	22,70%	22,85%	24,00%	23,15%	23,15%
2.1	IS.1 Persentase OP dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13 %	"65,71% (23 OPD)"	"65,71% (23 OPD)"	"68,57% (24 OPD)"	"71,43% (25 OPD)"	"74,29% (26 OPD)"	"77,14% (27 OPD)"	"80,00% (28 OPD)"	"80,00% (28 OPD)"
2.2	IS.2 Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	IS.3 Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	76,70%	76,70%	76,85%	77,00%	77,25%	77,50%	77,75%	77,75%
2.4	IS.4 Persentase implementasi rencana kelitbangan	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	85-100%	85-100%

Ket :
IT = Indikator Tujuan
IS = Indikator Sasaran

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi serta penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran di bidang perencanaan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pangandaran dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Pangandaran guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi BAPPEDA Kabupaten Pangandaran. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan BAPPEDA berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

BAPPEDA Kabupaten Pangandaran akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.



PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN